

KAJIAN EKOLOGI SPASIAL BENTANGLAHAN UNTUK KELESTARIAN SITUS SEJARAH DI KECAMATAN IMOGIRI DAN KRETEK KABUPATEN BANTUL

Oleh:

Nurul Khotimah

Jurusan Pendidikan Geografi UNY/Program Studi Ilmu Lingkungan, UGM

Abstract

Landscape ecology approach is needed to inventarized the historic site, environmental problem that be make management constraint, region potention, also direction and management priority, and development of historic sites as popular tourism area.

The result of the research shows that: (1) Historic sites at Imogiri District spread at Girirejo, Wukirsari, Karangtengah, Selopamioro, and Imogiri Villages, meanwhile at Kretek District gather in group at Parangtritis Village; (2) Whole land status of historic sites means Sultanground land status, with land processing that is done by around community for field, community forest, mining of C digging material, housing, homestay, shop/small shop that can make threaten historic sites continuity that exist; (3) The problems of environment around historic sites can be physical and social environment; and (4) For anticipating it needs making historic sites continuity organization or institution to organize and supported ecosystem approach as the effort to organize and developed the historic sites as popular tourism places.

Key Word: spatial ecology, historic sites, continuity

Pendahuluan

Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi memerlukan lahan yang semakin luas untuk permukiman sehingga mampu mengancam keberadaan kawasan tertentu, seperti kawasan sejarah, kawasan lindung, kawasan pertanian, bahkan kawasan sempadan sungai dan laut. Lebih lanjut pengelolaan sumberdaya lahan yang tidak arif akan mengancam kelestarian berbagai macam situs sejarah yang terdapat di Kecamatan Imogiri dan Kretek Kabupaten Bantul. Oleh sebab itu diperlukan inventarisasi perubahan penggunaan lahan untuk menentukan arahan pengelolaan sumberdaya lahan yang berwawasan lingkungan.

Alasan dipilihnya wilayah Kecamatan Imogiri dan Kretek sebagai wilayah penelitian karena kedua wilayah tersebut memiliki persamaan yaitu merupakan

kawasan situs sejarah, keduanya dilewati Sungai Opak, dan memiliki material yang sama, sedangkan perbedaannya yaitu dari aspek bentanglahannya. Kecamatan Imogiri mempunyai bentanglahan dataran alluvial dan pegunungan, sedangkan Kecamatan Kretek mempunyai bentanglahan dataran alluvial, pesisir, rawa, dan pasang surut.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi situs sejarah, status lahan situs sejarah, permasalahan lingkungan sekitar situs sejarah, dan arahan pengelolaan situs sejarah menjadi kawasan wisata di Kecamatan Imogiri dan Kretek Kabupaten Bantul.

Metode

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan *landscape ecology approach* sehingga memerlukan pendekatan yang mencakup aspek ekonomi, ekologi, dan budaya.

Di dalam ekologi, sistem kehidupan yang terkait merupakan suatu sistem ekologi yang utuh dan menyeluruh, yang di dalamnya terdapat saling ketergantungan antara setiap unsur dengan faktor kehidupan. Salah satu unsur ataupun salah satu faktor tersebut tidak dapat berdiri sendiri (Suratman Worosuprojo, 2004).

Dengan demikian penelitian ini menitikberatkan pada permasalahan lingkungan sebagai kendala pengelolaan yang berarti bagian dari ekosistem, dan mencari solusi untuk arahan pengembangan selanjutnya. Kajian yang berbasis ekosistem mampu menjadi dasar analisis selanjutnya untuk pengelolaan pengembangan situs sejarah sebagai kawasan wisata tanpa mengesampingkan kelestarian situs sejarah.

Rustiadi dan Panuju (2000) menyatakan bahwa ada 4 pilar yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan wilayah, yaitu (1) Inventarisasi, klasifikasi dan evaluasi sumber daya, (2) Ekonomi, (3) Kelembagaan, dan (4) Spasial.

Populasi penelitian ini adalah seluruh lahan yang berstatus Sultanground di kawasan Kecamatan Imogiri dan Kretek, sedangkan sampelnya adalah seluruh situs sejarah di dua kecamatan tersebut dengan status Sultanground yang berjumlah 16.

Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer melalui observasi lapangan dan wawancara maupun data sekunder melalui pengumpulan dokumen terkait maupun studi literatur. Analisis data yang digunakan dengan analisis foto udara/citra satelit dan analisis ekologi kawasan. Data yang didapatkan kemudian dideskripsikan dan ditabulasikan.

Hasil dan Pembahasan

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya (Pasal 1), situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.

Dilihat dari konteks zamannya, situs dimaksud terdiri atas situs purbakala dan situs sejarah. Benda cagar budaya terbagi atas dua kategori, yaitu: (a) benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan; dan (b) benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan (Sobana Hardjasaputra, 2006).

A. Persebaran Situs Sejarah

Persebaran situs sejarah di Kecamatan Imogiri tersebar dalam beberapa desa, yaitu Desa Girirejo, Wukirsari, Karangtengah, Selopamioro, dan Imogiri, sedangkan di Kecamatan Kretek mengelompok di Desa Parangtritis. Secara terperinci tentang persebaran situs sejarah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Persebaran Situs Sejarah di Kecamatan Imogiri dan Kretek

No	Situs Sejarah	Status Lahan	Penggunaan Lahan	Desa / Kecamatan
1.	Makam Imogiri	Magersari/SG	Permukiman, tegalan	Girirejo
2.	Makam Giriloyo/ Kacirebonan	Magersari/SG	Hutan Rakyat	Wukirsari
3.	Makam Pangeran Pekik	Magersari/SG	Permukiman, tegalan, cagar alam Mangunan	Karangtengah
4.	Purulaya Surakarta	Magersari/SG	Permukiman	Imogiri
5.	Purulaya Yogyakarta	Magersari/SG	Permukiman	Wukirsari
6.	Pasar Imogiri	Magersari/SG	Permukiman	Imogiri
7.	Gua Cermai	Magersari/SG	Hutan rakyat, tegalan	Selopamioro
8.	Makam Syech Maulana Maghribi	Magersari/SG	Hutan rakyat, tegalan	Parangtritis
9.	Makam Syech Bela-Belu	Magersari/SG	Hutan rakyat, tegalan	Parangtritis
10	Pemandian Parangwedang	Magersari/SG	Permukiman, tegalan	Parangtritis
11	Cepuri Parangkusumo	Magersari/SG	Permukiman	Parangtritis
12	Pantai Parangkusumo	Magersari/SG	Obyek Wisata	Parangtritis
13	Pantai Parangtritis	Magersari/SG	Obyek Wisata	
14	Pantai Parangendog	Magersari/SG	Obyek Wisata	
15	Gumuk Pasir Parangtritis	Magersari/SG	Tegalan	Parangtritis
16	Pantai Depok	Magersari/SG	Obyek Wisata, TPI, permukiman	Parangtritis

Sumber: survey lapangan tahun 2010

B. Status Lahan di Sekitar Situs Sejarah

Landasan hukum yang memayungi keberadaan tanah Sultan sebelumnya, yaitu Reijkblad van Djokjakarta Nomor 16 Tahun 1918, Surat Undang-Undang Kraton Kasultanan Jogjakarta Nomor 16 Tahun 1918 yang dikeluarkan Sultan Hamengku Buwono VII, dan Perda DIY No. 5 Tahun 1954 tentang Pertanahan pada saat ini tidak berlaku lagi sejak diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

UUPA No. 5 Tahun 1960 baru diberlakukan sepenuhnya di DIY sejak tanggal 24 September 1983. Seperti kita ketahui bahwa saat UUPA diberlakukan sepenuhnya di DIY ditemui berbagai kendala. Beberapa hal yang belum dapat berjalan dan memerlukan penanganan bertahap adalah pendaftaran tanah, khususnya untuk tanah bekas tanah hak adat yang kenyataannya masih menggunakan Peraturan Daerah (Perda) DIY.

Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1984 menyatakan bahwa dengan berlakunya UUPA No. 5 Tahun 1960 di DIY, maka seluruh peraturan pelaksanaan dari UU tersebut juga berlaku di DIY. Hal ini didukung berlakunya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari pasal 19 UUPA No. 5 Tahun 1960.

Urusan menyangkut tanah Sultan atau "Sultanground" kemudian diatur oleh Paniti Kismo, yaitu sebuah lembaga yang berada di dalam kraton. Lembaga ini menjadi satu-satunya pihak yang berhak mengeluarkan izin pemakaian tanah Sultan.

Namun demikian, meskipun Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian bergabung dengan Republik Indonesia sejak tanggal 5 September 1945, Reijkblad van Djokjakarta tetap digunakan untuk mengatur pendaftaran hak atas tanah. Dalam hal ini, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria tidak berlaku efektif di seluruh wilayah DIY, terutama jika menyangkut urusan tanah milik kraton. Hal ini menyebabkan di kalangan masyarakat, Kekancingan Magersari sering diperjualbelikan, bahkan oleh oknum aparat desa.

Di wilayah Bantul, banyak diketemukan tanah Sultanground. Salah satunya di Kecamatan Imogiri. Hamparan luas daerah pegunungan merupakan Sultanground, yang dimanfaatkan warga sekitar. Hal ini dijumpai di Desa Selopamiro Imogiri, terdapat \pm 500 hektar tanah Sultanground, selain dimanfaatkan untuk pertanian dan penghijauan, sebagian digunakan untuk lokasi Sekolah Polisi Negara (SPN) seluas \pm 26 hektar. Pemanfaatan lain adalah untuk bangunan sekolah, pemakaman dan masjid.

Di Desa Karangtengah Imogiri, luas Sultanground \pm 58,5 hektar yang semuanya dimanfaatkan atas perintah Ngarsa Dalem. Pemanfaatannya untuk lokasi transmigrasi lokal seluas 25 hektar, untuk agro wisata sutra alam seluas 15 hektar, penanaman tanaman langka seluas 2 hektar dan sisanya untuk pertanian masyarakat sekitar.

Selain di Kecamatan Imogiri, tanah Sultanground juga ditemukan di kawasan Parangtritis yang merupakan kawasan tepi pantai dan termasuk kawasan lindung, seperti tercantum dalam Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Kawasan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Dalam kawasan lindung tentunya dapat dilakukan upaya penggusuran oleh pemerintah setempat apabila aktivitas manusia di sekitarnya mengancam kepunahan kawasan lindung. Lebih lanjut mengenai larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 Tahun 1960. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa pemerintah (penguasa daerah) memiliki wewenang mengambil tindakan untuk mengambil tanah sewaktu-waktu jika diperlukan.

Hingga kini belum ada pendataan resmi luasan tanah Sultanground sebenarnya, meski selama ini pengelolaannya telah dilakukan oleh desa. Kendati demikian tidak ada pajak yang harus dibayar dari pengguna Sultanground. Ini berarti tanah itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat maupun instansi dengan seizin desa, namun demikian statusnya hanya hak pakai atau menumpang, sehingga jika sewaktu-waktu akan digunakan oleh pihak Kraton, tentunya tidak perlu ada tarik ulur lagi. Selain tak ditarik retribusi atau sewa, pihak desa sebagai pengelola Sultanground juga tidak memberikan kontribusi kepada Kraton. Tidak ada "pasok glondhong pengarem-arem" dari desa untuk Kraton.

Secara keseluruhan situs sejarah yang terdapat di Kecamatan Imogiri dan Kretek merupakan situs yang berkaitan dengan keberadaan Kraton Yogyakarta, sehingga dengan sendirinya kepemilikan atau status lahan di seluruh situs yang ada merupakan tanah yang berstatus Sultanground.

C. Permasalahan Lingkungan di Sekitar Situs Sejarah

Permasalahan lingkungan hidup merupakan kendala bagi pengelolaan dan pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan. Permasalahan lingkungan hidup terdiri dari kerusakan lingkungan fisik dan kendala lingkungan sosial. Kerusakan lingkungan fisik dapat berupa erosi, degradasi lahan, longsor lahan, banjir, konversi hutan (alih fungsi hutan), penambangan liar, perambahan hutan, lahan kritis, hingga ketersediaan air bersih.

Kerusakan lingkungan yang berupa erosi, degradasi lahan, longsor lahan dan banjir diakibatkan oleh konversi hutan dan penebangan liar/perambahan hutan, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap ketersediaan/cadangan air tanah karena berubahnya fungsi hutan sebagai kawasan resapan menjadi lahan pertanian atau bahkan menjadi lahan permukiman penduduk.

Kendala lingkungan sosial berupa tingkat pendidikan yang rendah, kemiskinan dan kepadatan penduduk yang mengakibatkan kesadaran masyarakat rendah terhadap kelestarian lingkungan hidup. Hal ini berakibat pada kegiatan penduduk yang akan mendorong kerusakan lingkungan hidup yang semakin cepat, misalnya perambahan hutan karena masyarakat masih menggantungkan hidupnya dari ketersediaan yang ada di sekitarnya. Secara terperinci permasalahan lingkungan dapat dilihat pada Tabel 2.

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan lingkungan hidup yang ada di sekitar situs sejarah berupa erosi, degradasi lahan, konversi hutan, perambahan hutan dan penambangan liar. Permasalahan lingkungan hidup ini dapat ditemukan hampir di seluruh situs sejarah di Kecamatan Imogiri dan Kretek yaitu pada ekosistem perbukitan dan ekosistem sungai.

Di ekosistem perbukitan, terdapat perambahan hutan/penebangan liar, penambangan tanah urug dan batu bahan baku rumah, misalnya di sekitar gua Cerme, Makam Pangeran Pekik, Makam Maulana Maghribi dan Makam Syech Bela Belu. Di ekosistem sungai, terdapat penambangan pasir yang mengakibatkan kerusakan pada tanggul sebelah barat dan selatan Jembatan Kretek dan sekarang baru dilaksanakan renovasi, juga penambangan di tempuran sungai Opak – Oyo.

Tabel 2. Permasalahan Lingkungan Hidup Di Sekitar Situs Sejarah

No.	Situs Sejarah	Ekosistem	Desa	Permasalahan Lingkungan Hidup
1.	Makam Imogiri	Perbukitan struktural	Girirejo	a. Bangunan makam tidak terawat terutama pada bagian makam Sultan Agung dan makam Yogyakarta
				b. Lingkungan sekitar gersang dan tingkat erosi tinggi
				c. Sistem sosial budaya masyarakat sekitar belum dikelola sebagai daya dukung
				d. MCK tidak berfungsi
				e. Tidak ada taman bermain/ tempat istirahat
				f. Pasar makanan tradisional belum terelokasi dengan baik
2.	Makam Giriloyo/ Kacirebonan	Perbukitan struktural	Wukirsari	a. Bangunan makam tidak terawat terutama pada bagian tembok dan pagar pelindung
				b. MCK tidak berfungsi
				c. Tidak ada taman bermain/ tempat istirahat
				d. Angkutan umum tidak ada
				e. Tidak ada <i>showroom</i> untuk memamerkan hasil kerajinan batik

No.	Situs Sejarah	Ekosistem	Desa	Permasalahan Lingkungan Hidup
				f. Penambangan batu untuk bangunan
				g. Kekeringan
3.	Makam Pangeran Pekik	Lembah antar perbukitan struktural	Karangtengah	a. Tidak ada angkutan umum
				b. Tidak ada event/festival pendukung
				c. Lahan gersang dan tingkat erosi tinggi
				d. Retribusi belum ada
				e. Tidak ada warung makan
4.	Purulaya Yogyakarta dan Surakarta Pasar Imogiri	Kota	Wukirsari – Imogiri	a. Polusi udara
				b. Keadaan pasar kumuh pada waktu musim penghujan
				c. Sungai kotor dan bau
				d. Situs peninggalan sejarah tidak terawat
				e. Pasar kelihatan semrawut dan kumuh
				f. Purulaya Bupati Yogyakarta dan Surakarta tidak terawat
5.	Gua Cerme	Perbukitan karst	Selopamiro	a. Keterbatasan aksesibilitas
				b. Taman bermain/rekreasi kurang terawat sebagai obyek pendukung
				c. Kekeringan
				d. Keterbatasan <i>guide</i>
				e. Kerusakan lahan (erosi, degradasi, longsor)
				f. Retribusi tidak kontinu
6.	Makam Syech Maulana Magribi Makam Syech Bela Belu	Perbukitan struktural	Parangtritis	a. Erosi, degradasi lahan dan longsor lahan
				b. Perambahan hutan
				c. Perubahan fungsi lahan/ konversi hutan ke permukiman
				d. Kekeringan
				e. Kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup rendah
7.	Pemandian Parangwedang	Pesisir	Parangtritis	a. Tidak ada areal parkir untuk bus-bus besar
				b. Tidak ada <i>showroom</i> khusus untuk memamerkan hasil karya kerajinan
				c. Fasilitas umum, seperti: MCK, mushola, pendapa tidak memadai
				d. Tidak ada taman/tempat beristirahat
				e. Tidak ada promosi
				f. Penambangan tanah urug/batu

No.	Situs Sejarah	Ekosistem	Desa	Permasalahan Lingkungan Hidup
				g. Belum ada tempat pembuangan limbah
				h. Retribusi terlalu murah
8.	Cepuri Parangkusumo Pantai Parangkusumo Pantai Parangtritis Pantai Parangendog	Pesisir	Parangtritis	a. Abrasi
				b. Terlalu panas
				c. Penambangan pasir
				d. Banyaknya kios dan warung
				e. Ada taman untuk beristirahat, tetapi tidak ada sarana bermain
				f. MCK milik Pemda kurang terawat
9.	Gumuk Pasir Parangtritis	Gumuk pasir	Parangtritis	a. Abrasi
				b. Okupasi oleh penduduk pendatang
				c. Pertanian lahan pasir
				d. Tidak ada fasilitas khusus untuk wisata
				e. Penambangan pasir
10.	Pantai Depok	Sungai, Estuari	Parangtritis	a. Kerusakan lahan
				b. Kerusakan jalan
				c. Ada sarana untuk wisata, akan tetapi belum memadai

Sumber: survey lapangan tahun 2010

D. Arahan pengembangan situs sejarah sebagai kawasan wisata

Arahan pengembangan situs sejarah di Kecamatan Imogiri dan Kretek sebagai kawasan wisata dengan pengembangan yang berwawasan lingkungan, maka dalam pengembangannya mempertimbangkan berbagai hal di bawah ini:

1. Kelestarian situs peninggalan

Pengembangan situs sejarah sebagai kawasan wisata perlu mempertimbangkan kelestarian situs peninggalan yang merupakan peninggalan sejarah, dalam hal ini perlu adanya renovasi dan pelestarian di dalam pengembangannya sehingga mampu mempertahankan keberadaan situs sejarah tersebut.

2. Kelestarian lingkungan alam atau ekosistem sekitar situs sejarah

Kelestarian lingkungan alam atau ekosistem sangat perlu dijaga kelestariannya karena merupakan salah satu faktor pendukung bagi keberadaan situs sejarah. Ekosistem merupakan daya dukung yang penting bagi pengembangan suatu situs sebagai kawasan wisata yang berwawasan lingkungan.

3. Penanggulangan dampak pengembangan situs sejarah

Dampak positif dan dampak negatif dari pengembangan situs sejarah perlu dipertimbangkan karena berpengaruh terhadap keberadaan masyarakat sekitar situs sejarah yang dikembangkan.

4. Kondisi sosial budaya masyarakat sekitar situs sejarah

Sistem sosial budaya masyarakat merupakan pencerminan norma dan nilai masyarakat di sekitar situs sejarah yang merupakan etos (watak/ciri khas) yang menjadi salah satu daya dukung tersendiri bagi situs sejarah yang akan dikembangkan. Arahannya pengembangan situs sejarah sebagai kawasan wisata secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Arahannya Pengembangan Situs Sejarah sebagai Kawasan Wisata

No	Situs Sejarah	Ekosistem	Kendala/Masalah LH	Faktor Penyebab	Arahannya Pengembangan
1	Makam Imogiri	Perbukitan struktural	a. Bangunan makam tidak terawat terutama pada bagian makam Sultan Agung dan makam Yogyakarta	a. Konflik kepentingan antara Kraton Solo dan Yogyakarta	a. Dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten atau Propinsi
			b. Lingkungan sekitar gersang dan tingkat erosi tinggi	b. Penebangan oleh masyarakat	b. Penghijauan kembali/GNRHL
			c. Sistem sosial budaya masyarakat sekitar belum dikelola sebagai daya dukung	c. Belum ada tempat khusus untuk pentas kesenian	c. Pembangunan panggung kesenian yang permanen
			d. MCK tidak berfungsi	d. Tidak tersedianya air bersih dan kebersihan tidak terjaga	d. Penyediaan fasilitas air bersih (PAM)
			e. Tidak ada taman bermain/ tempat istirahat	e. Merupakan kompleks makam keramat	e. Penanaman tanaman perindang dan adanya tempat beristirahat kecuali pendapa
			f. Pasar makanan tradisional belum terlokasi dengan baik	f. Masyarakat berjualan dengan cara berjalan/ asongan dan jarak antara situs sejarah dengan tempat parkir cukup jauh	f. Relokasi pedagang asongan di satu tempat, dekat terminal atau sepanjang jalan menuju makam
			g. Retribusi tidak jelas	g. Pengelolaan retribusi mengalami kebingungan dalam pengelolaannya	g. Retribusi dipungut dengan mendirikan gerbang retribusi sebelum masuk situs sejarah

No	Situs Sejarah	Ekosistem	Kendala/Masalah LH	Faktor Penyebab	Arahan Pengembangan
2	Makam Giriloyo/ Kacirebonan	Perbukitan struktural	a. Bangunan makam tidak terawat terutama pada bagian tembok dan pagar pelindung	a. Dana bantuan kurang	a. Dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten atau Propinsi
			b. MCK tidak berfungsi	b. Tidak tersedianya air bersih, kebersihan tidak terjaga	b. Penyediaan fasilitas air bersih (PAM)
			c. Tidak ada taman bermain/ tempat istirahat	c. Merupakan kompleks makam keramat	c. Penyediaan tempat untuk pendapa
			d. Angkutan umum tidak ada	d. Daerah terpencil	d. Pembuatan jalur angkutan yang melewati situs sejarah
			e. Tidak ada <i>showroom</i> untuk memamerkan hasil kerajinan batik	e. Hasil kurang diminati wisatawan karena harganya cenderung mahal	e. Pengaktifan rumah karya dan promosi hasil kerajinan batik ke luar daerah
			f. Penambangan batu untuk bangunan	f. Mata pencaharian penduduk	f. Penghentian kegiatan penambangan dengan memberi alternatif kegiatan lain, misalnya peningkatan produk rumah tangga
			g. Kekeringan	g. Pada musim kemarau air sumur kering	g. Penyediaan air bersih (PAM)
3	Makam	Lembah antar perbukitan struktural	a. Tidak ada angkutan umum	a. Angkutan hanya sampai terminal di dekat makam raja Imogiri	a. Pembuatan jalur angkutan yang melewati situs sejarah
	Pangeran Pekik		b. Tidak ada event/festival pendukung	b. Merupakan makam keramat dan makam tokoh yang disegani masyarakat	b. Penciptaan event/festival, misalnya untuk lokasi outbond
			c. Lahan gersang dan tingkat erosi tinggi	c. Kayu, terutama jati dan sonokeling banyak ditebangi	c. Penanaman penghijauan/perindang

No	Situs Sejarah	Ekosistem	Kendala/Masalah LH	Faktor Penyebab	Arahan Pengembangan
				masyarakat sekitar	
			d. Retribusi belum ada	d. Bukan merupakan obyek terkenal	d. Dijadikan satu dengan retribusi obyek yang lain
			e. Tidak ada warung makan	e. Masyarakat berjualan di kompleks makam raja Imogiri	e. Pembuatan kios dan warung makan
4	Purulaya Yogyakarta dan Surakarta	Kota	a. Polusi udara	a. Bau sampah pasar dan lalu lintas ramai	a. Pengelolaan sampah dan pengaturan lalu lintas/ pelebaran jalan
	Pasar Imogiri		b. Keadaan pasar kumuh pada waktu musim penghujan	b. Lantai pasar belum diperkeras dan saluran sanitasi tidak berfungsi	b. Pengerasan lantai pasar dan pemulihan fungsi saluran sanitasi
			c. Sungai kotor dan bau	c. Limbah rumah tangga dan pasar dibuang di kali Celeng	c. Penyuluhan masyarakat tentang kesadaran lingkungan hidup sehat
			d. Situs peninggalan sejarah tidak terawat	d. Banyak dirusak masyarakat untuk kepentingan pribadi misal pelebaran rumah	d. Penyuluhan masyarakat tentang kelestarian cagar budaya
			e. Pasar kelihatan semrawut dan kumuh	e. Kios kurang tertata	e. Penataan kios dan pedagang sesuai dengan jenis barang dagangannya
			f. Purulaya Bupati Yogyakarta dan Surakarta tidak terawat	f. Tidak ada dana dari Kraton maupun pemerintah daerah	f. Dijadikan museum
5	Gua Cerme	Perbukitan karst	a. Keterbatasan aksesibilitas	a. Jarak dari kota jauh, tidak ada angkutan umum	a. Pengadaan jalur wisata
			b. Taman bermain/rekreasi kurang terawat sebagai obyek pendukung	b. Belum ada pihak pengelola swasta	b. Pembuatan kolam renang, taman bermain, dicarikan pengelola swasta
			c. Kekeringan	c. Daerah	c. Penyediaan PAM

No	Situs Sejarah	Ekosistem	Kendala/Masalah LH	Faktor Penyebab	Arahan Pengembangan
				perbukitan kapur	
			d. Keterbatasan guide	d. Wisatawan jarang	d. Kerja sama dengan biro jasa <i>tour's and travel</i> dengan paket wisata
			e. Kerusakan lahan (erosi, degradasi, longsor)	e. Penambangan batu gamping, penambangan liar/perambahan hutan, dan kemiskinan masyarakat	e. Pembuatan papan larangan penambangan, pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan kawasan situs
			f. Retribusi tidak kontinu	f. Wisatawan berkunjung pada hari-hari tertentu (hari ahad, libur nasional, hari besar)	f. Pembuatan event yang mendukung keberadaan situs
6	Makam Syech Maulana Magribi	Perbukitan struktural	a. Erosi, degradasi lahan dan longsor lahan	a. Penambangan hutan dan penambangan tanah urug	a. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang kelestarian lingkungan hidup dan reklamasi daerah bekas penambangan
	Makam Syech Bela Belu		b. Perambahan hutan	b. Mencari bahan baku arang kayu	b. Peningkatan kesadaran masyarakat
			c. Perubahan fungsi lahan/ konversi hutan ke permukiman	c. Pembukaan hutan untuk permukiman	c. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai lingkungan hidup
			d. Kekeringan	d. Sumber air tanah untuk dibuat sumur sangat sulit	d. Penyediaan instalasi air bersih dan bak penampungan air hujan
			e. Kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup rendah	e. Tingkat pendidikan masyarakat rendah	e. Penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya kelestarian lingkungan hidup
7	Pemandian Parangwedang	Pesisir	a. Tidak ada areal parkir	a. Para pengrajin letaknya tersebar	a. Pembuatan areal parkir yang mampu menampung angkutan umum atau sub terminal
			b. Tidak ada showroom khusus untuk memamerkan hasil karya kerajinan	b. Tempat terbatas	b. Pembuatan museum atau <i>showroom</i> yang khusus menampung

No	Situs Sejarah	Ekosistem	Kendala/Masalah LH	Faktor Penyebab	Arahan Pengembangan
					hasil karya seluruh pengrajin sekitar situs
			c. Fasilitas umum, misal: MCK, mushola, pendapa tidak memadai	c. Tempat keramat	c. Pengadaan fasilitas umum
			d. Tidak ada taman/tempat beristirahat	d. Letaknya di sepanjang jalan	d. Pengadaan taman
			e. Tidak ada promosi	e. Masyarakat menjual sendiri hasil karyanya dan belum ada organisasi pengrajin	e. Pengadaan promosi lebih gencar
			f. Penambangan tanah urug/batu	f. Masyarakat sekitar	f. Rehabilitasi lahan
			g. Belum ada tempat pembuangan limbah	g. Limbah pemandian disalurkan ke selokan	g. Pembuatan tempat penam-pungan limbah
			h. Retribusi terlalu murah	h. Tidak termasuk obyek terkenal	h. Dijadikan satu dengan obyek yang lain
8	Cepuri Parangkusumo	Pesisir	a. Abrasi	a. Arus dan gelombang pantai selatan	a. Tripod dan tetrapod
	Pantai Parangkusumo		b. Terlalu panas	b. Lahan gumuk pasir	b. Pengadaan bungalow
	Pantai Parangtritis		c. Penambangan pasir	c. Deliniasi wilayah perlindungan situs	c. Penataan dan relokasi
	Pantai Parangendog		d. Banyaknya kios dan warung	d. Mata pencaharian masyarakat	d. Penataan dan relokasi
			e. Ada taman untuk beristirahat, tetapi tidak ada sarana bermain	e. Jarangnya wisatawan yang mempergunakan fasilitas tersebut	e. Promosi wisata
			f. MCK milik Pemda kurang terawat	f. Banyak masyarakat yang mengelola MCK pribadi	f. Menyerahkan kepada masyarakat untuk mengelola
9	Gumuk Pasir Parangtritis	Gumuk pasir	a. Abrasi	a. Arus dan gelombang pantai selatan	a. Pemasangan tetraport
			b. Okupasi oleh penduduk	b. Dijadikan penginapan dan	b. Diserahkan kepada Dinas Kepurbakalaan

No	Situs Sejarah	Ekosistem	Kendala/Masalah LH	Faktor Penyebab	Arahan Pengembangan
			pendatang	warung makan illegal	atau Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul untuk penataan
			c. Pertanian lahan pasir	c. Menghambat laju perkembangan gumpuk pasir	c. Deliniasi wilayah perlindungan
			d. Tidak ada fasilitas khusus untuk wisata	d. Tidak ada event khusus untuk dijadikan sebagai daya tarik	d. Pengadaan fasilitas umum
			e. Penambangan pasir	e. Sebagai tanah urug	e. Deliniasi wilayah perlindungan
10	Pantai Depok	Sungai, Estuari	a. Kerusakan lahan	a. Akibat penambangan pasir, batu di sungai	a. Pemasangan papan larangan penambangan
			b. Kerusakan jalan	b. Lalu lintas angkutan pasir dan batu	b. Perbaikan jalan
			c. Ada sarana untuk wisata, akan tetapi belum memadai	c. Terpisah dari kawasan wisata utama	c. Penyediaan sarana prasarana wisata dan wisata unggulan (kuliner: masakan laut)

Sumber : survey lapangan tahun 2010

E. Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Situs Sejarah

Masyarakat sebagai subyek dan obyek dalam pengembangan situs sejarah sebagai kawasan wisata, maka partisipasinya sangat diperlukan dalam pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan. Berdasarkan hasil survey di lapangan dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan kesadaran perlunya kelestarian lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu partisipasi aktif, partisipasi pasif, dan tidak ikut berpartisipasi. Partisipasi aktif ditunjukkan dengan ikut menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di sekitar situs sejarah, tidak merambah hutan, menghentikan penambangan liar, penghijauan/penanaman kembali, dan ikut serta dalam pembuatan event kesenian masyarakat sebanyak 70%. Partisipasi pasif ditunjukkan dengan pemberian ide/gagasan untuk usaha pelestarian lingkungan dan mengikuti program perencanaan dan pengelolaan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah tentang penetapan kawasan lindung di kawasan pariwisata sebanyak 24% dan hanya 6% masyarakat yang tidak ikut serta memberikan dukungan bagi kelestarian lingkungan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberadaan situs sejarah di Kecamatan Imogiri menyebar di beberapa desa, antara lain Desa Girirejo, Wukirsari, Karangtengah, Selopamioro, dan Imogiri, sedangkan situs sejarah di Kecamatan Kretek mengelompok di Desa Parangtritis.
2. Seluruh situs sejarah yang terdapat di Kecamatan Imogiri dan Kretek status lahannya adalah Sultanground.
3. Permasalahan lingkungan hidup yang ada di Kecamatan Imogiri dan Kretek berupa permasalahan lingkungan fisik dan sosial.
4. Untuk mengantisipasi permasalahan di atas perlu adanya model kelembagaan yang mengelola dan mengembangkan situs sejarah yang ada serta didukung pendekatan ekosistem sebagai upaya pengelolaan dan pengembangan situs sejarah sebagai kawasan wisata yang berwawasan lingkungan.

Saran

1. Pembentukan forum komunikasi/lembaga pengelolaan dan pengembangan situs sejarah sebagai kawasan wisata yang berwawasan lingkungan diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi BAPPEDA, Dinas Pariwisata, LSM, dan masyarakat sekitar.
2. Permasalahan lingkungan hidup yang perlu untuk ditindaklanjuti penanganannya adalah:
 - a. Lahan kritis dengan cara penataan penggunaan lahan sesuai dengan klas kemampuan lahannya.
 - b. Erosi dan degradasi lahan dengan cara membatasi areal penambangan dan perambahan hutan ke lahan pertanian semusim.
 - c. Kerusakan hutan, penanganan dengan GNRHL dan penyuluhan/sosialisasi terhadap masyarakat perlunya fungsi hutan.
 - d. Kerusakan lahan akibat penambangan, penanganan dengan cara reklamasi lahan bekas penambangan dan penggunaan kembali sesuai dengan fungsi lahan yang telah ditetapkan

Ucapan Terima Kasih

Demikian artikel penelitian ilmiah saya susun, perkenankan saya pada kesempatan ini menyampaikan ungkapan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya selama ini.

Saya ucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk mendapatkan penelitian hibah disertasi doktor.

Kepada yang terhormat Ketua LPPM UGM, Direktur Sekolah Pascasarjana

UGM, Dekan Fakultas Geografi UGM, Prof. Dr. Suratman, M.Sc. yang telah bersedia menjadi promotor, dan Laboratorium Geografi FISE UNY yang telah banyak membantu dalam penelitian ini, serta berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Daftar Pustaka

- Rustiadi, E dan D.R Panuju. 2003. *A Study of Spatial Pattern of Suburbanization Process : A Case Study in Jakarta Suburb*, IGU-LUCC Pre-Congress Meeting in Tsukuba.
- Sobana Hardjasaputra. 2006. Situs dan Benda Cagar Budaya di Purwakarta dan Upaya Pelestariannya. Makalah Seminar Perlindungan Situs dan Benda Cagar Budaya Dalam Menjunjung Eksistensi Jatidiri Budaya Purwakarta. Purwakarta, 21 September 2006.
- Suratman Worosuprojo. 2004. Ekologi Bentanglahan dan Aplikasinya. Pidato dalam rangka Dies Natalies ke 41 Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. 1 September 2004.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.